

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah mencapai sukses yang mencengangkan sejak awal tahun 1970-an dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang besar dan stabil. Output ekonomi tumbuh rata-rata lebih dari 7% per tahun sehingga pendapatan rata-rata lebih dari empat kali lipat. Lebih dari itu, keuntungan dari pembangunan ekonomi tersebar luas. *Share* kehidupan populasi dibawah garis kemiskinan turun dari 60% pada awal 1970-an menjadi hanya sekitar 11% pada tahun 1996, penurunan yang tercepat terhadap angka kemiskinan dimanapun di dunia ini selama kurun waktu itu. Kematian balita turun tajam, harapan hidup secara berkala meningkat, dan angka buta huruf menurun. Setelah bertahun-tahun menjadi negara pengimpor beras terbesar, Indonesia, melakukan swasembada pangan pada akhir tahun 1980-an. Standar kehidupan meningkat tajam, dan hampir setiap orang diharapkan dapat mempertahankan peningkatan ini.¹

Indonesia merupakan sebuah negara yang termasuk dalam *emerging markets*. Indonesia bahkan sempat diramalkan akan mencapai pertumbuhan ekonomi signifikan seperti yang dialami oleh Cina. Fakta-fakta pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengagumkan pada masa itu merupakan salah satu indikator yang menyebabkan negara-negara asing rela menginvestasikan dananya di Indonesia. Namun kondisi yang menjanjikan ini secara tiba-tiba berubah ketika Indonesia dilanda oleh krisis finansial yang dahsyat, yaitu Krisis Finansial Asia yang berawal pada tahun 1997. Semenjak itu, Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi dan mendapatkan skema bantuan dari *International Monetary Fund* (IMF). Pada saat Indonesia sedang berusaha memulihkan kondisi

¹ Lihat Steven Radelet, "Indonesia's Implosion," *Harvard Asia Pacific Review*, forth-coming, *Harvard Institute for International Development*, 30 September 1998, p. 1

perekonomiannya pasca Krisis Finansial Asia 1997, Indonesia kembali menghadapi tantangan atas implikasi dari krisis finansial yang dikenal dengan nama Resesi Global pada tahun 2008.

1.1.1. Latar Belakang Krisis Finansial Asia 1997-1998

Krisis Finansial Asia pada mulanya terjadi di Thailand pada tahun 1997 ketika mata uang Thailand, Baht, mengalami devaluasi besar-besaran. Hal ini terjadi karena Pemerintah Thailand memutuskan untuk mengganti kebijakan perekonomian terkait sistem kurs yang digunakan. Pemerintah Thailand pada saat itu membiarkan kurs mengikuti harga pasar. Pada tanggal 2 Juli 1997, setelah perdagangan bebas atas mata uang Baht dan aksi para spekulasi di pasar valas, Baht mengalami depresiasi yang berakibat pada munculnya krisis finansial di Thailand.

Krisis finansial yang dialami Thailand oleh Indonesia pada saat itu dianggap tidak akan serta merta terjadi di Indonesia. Indonesia sebagaimana digambarkan di atas berada dalam pertumbuhan ekonomi yang sangat menjanjikan sehingga menjadi hal yang mustahil bagi Indonesia untuk terkena dampak dari krisis finansial yang melanda Thailand. Namun, krisis yang dialami Thailand ini kemudian memiliki efek menular atau *contagion effects* terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Indonesia menjadi satu-satunya negara yang terkena dampak krisis terburuk. Depresiasi mata uang Rupiah pada saat krisis mencapai lebih dari 300%. Depresiasi ini membawa Indonesia pada kerapuhan ekonomi serta penumpukan jumlah hutang yang sangat besar.

Tidak hanya dampak pada penumpukan jumlah hutang yang berkali lipat, krisis ini juga mengakibatkan kepercayaan investor asing terhadap negara-negara Asia Tenggara pun menurun tajam sehingga para investor asing mulai menarik dana investasinya dari negara-negara di Asia Tenggara. Runtutan kehancuran

fundamental perekonomian Indonesia akibat Krisis Finansial Asia ini pada akhirnya bermuara pada terganggunya stabilitas sosial serta politik Indonesia.

Masalah-masalah sosial serta politik baru bermunculan. Secara sosial jumlah pengangguran serta masyarakat miskin bertambah drastis. Sedangkan dari segi politik, hancurnya perekonomian Indonesia kemudian menimbulkan ketidakpuasan masyarakat atas kepemimpinan Pemerintah berkuasa pada saat itu yaitu Presiden Soeharto. Kebobrokan Pemerintahan Soeharto kemudian muncul pada saat terjadinya krisis Finansial Asia ini. Masyarakat Indonesia dihadapkan pada jumlah hutang luar negeri yang luar biasa besar akibat ulah dari kroni-kroni serta keluarga Soeharto. Praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) yang sangat merugikan negara dalam Pemerintahan Soeharto semakin menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemerintahannya.

Hal ini kemudian memicu kondisi politik yang tidak menentu akibat banyaknya gerakan mahasiswa serta masyarakat yang berdemonstrasi menuntut mundurnya Soeharto dari kursi kepemimpinan. Gerakan ini atau yang disebut sebagai gerakan reformasi kemudian berakhir dengan pengunduran diri Soeharto dari jabatan Presiden RI. Ketidakstabilan ini secara signifikan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia dimana para investor asing serta spekulan mata uang menarik dana mereka dari Indonesia dan mata uang Rupiah sehingga menyebabkan Indonesia semakin terjerumus dalam pusaran krisis finansial Asia ini.

1.1.2. Latar Belakang Krisis Global 2008

Berbeda dengan krisis finansial Asia tahun 1997 yang berasal dari negara satu kawasan yaitu Thailand, krisis global tahun 2008 justru bersumber dari negara adidaya Amerika Serikat. Bagi beberapa peneliti, krisis global 2008 sudah bisa diperkirakan, bahkan telah diperkirakan akan terjadi. Deregulasi pasar yang berlebihan dalam likuiditas dan suku bunga rendah, gelembung real estate global, dan meroketnya pinjaman perumahan. AS memiliki gelembung perumahan, dan

Universitas Indonesia

ketika gelembung ini pecah, harga rumah turun drastis, dan pemilik rumahpun tenggelam dalam pusaran kredit mereka. Kewajiban pembayaran kredit para pemilik rumah ini jauh lebih besar daripada harga rumah yang mereka miliki. Setelah mereka kehilangan rumah, kemudian banyak dari mereka yang mulai kehilangan tabungan dan mimpi akan masa depan.

Perekonomian terdiri dari: dua pertiga sampai tiga perempat perekonomian (dari PDB) berkaitan dengan perumahan: membangun rumah baru atau membeli isi rumah, atau mengajukan pinjaman atas rumah lama mereka untuk membiayai konsumsi. Pecahnya gelembung pertama kali berdampak sangat buruk pada pinjaman (pinjaman perumahan, pinjaman kepada individu dengan pendapatan rendah), namun kemudian berdampak pada seluruh pemilik residential real estate.

Pada titik ini, AS dan dunia menghadapi krisis finansial dan krisis ekonomi. Krisis ekonomi memiliki beberapa komponen: Terdapat perkembangan krisis residential real estate, diikuti tidak lama setelahnya dengan real estate komersial. Permintaan menurun, ketika para rumah tangga melihat nilai rumah mereka (dan apabila mereka memiliki saham, nilai saham mereka juga) jatuh dan kemampuan mereka – dan keinginan – untuk meminjam musnah. Terdapat siklus inventaris ketika pasar kredit membeku dan permintaan jatuh, perusahaan mengurangi inventaris mereka secepat mungkin. Dan jatuhlah sektor manufaktur AS.²

Krisis global ini menyebabkan dunia terkungkung dengan kegagalan, merger, rekapitalisasi dari beberapa institusi finansial Amerika Serikat dan Eropa sejak September 2008, yang kemudian berdampak pada pasar modal global dan menimbulkan kerugian nilai pasar terhadap ekuitas, penurunan permintaan dan tingginya pengangguran. Para pemimpin politik dan pejabat senior dari Kementerian Keuangan dan Bank Sentral telah mengkoordinasikan usaha-usaha

² Stiglitz, J. E. (2010). *Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy*. New York: W.W,Norton&Company, Inc, p.1-3

mereka untuk menangani kepanikan namun krisis tetap menyebar dan bahkan semakin mendalam setiap waktu.³

Krisis global yang melanda AS kemudian menjalar ke berbagai negara di dunia. Sektor pasar modal dan saham menjadi salah satu sektor yang sangat terpuruk akibat krisis global ini. Pada saat pasar modal Amerika berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, Pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk melakukan *suspend* pada Bursa Efek Indonesia. Hal ini dilakukan secara tiba-tiba sehingga para spekulasi yang sedang bertransaksi pada saat itu turut merasakan kerugian akibat kebijakan Pemerintah Indonesia ini. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah untuk melakukan *suspend* dalam perdagangan bursa efek merupakan sebuah kebijakan proteksi agar pasar modal sebagai salah satu sendi perekonomian Indonesia tidak terpuruk ke dalam krisis global 2008 ini.

1.2. Permasalahan Penelitian

Dampak krisis finansial baik krisis finansial Asia 1997-1998 maupun krisis global 2008 berbeda tingkatannya di tiap-tiap negara. Hal ini tergantung pada beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Begitupun dampak yang dirasakan oleh Indonesia dalam menghadapi kedua krisis ini. Berdasarkan besaran dampak yang dialami oleh Indonesia, maka kedua krisis ini menunjukkan dampak yang berbeda.

Pada periode 1967-1997, Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 6.5%; sedangkan pada tahun 1998, perekonomian mengalami kontraksi sebesar 13.6%. Hal ini merupakan kejatuhan terbesar di antara negara-negara Asia Tenggara, dan Indonesia merupakan negara satu-satunya di kawasan yang mengalami inflasi yang sangat serius pada tahun 1998.⁴ Tingkat kemiskinan

³ Lihat "ASEAN Roundtable 2009, The Global Economic Crisis: Implications for ASEAN" diakses dari www.iseas.edu.sg/aseanstudiescentre, pada 6 September 2009, p. 1

⁴ Hill 1999:23-24 dalam Sunderlin, William D, "THE EFFECTS OF ECONOMIC CRISIS AND POLITICAL CHANGE ON INDONESIA'S FOREST SECTOR, 1997-99," www.cgiar.org,. 15 November 1999, <http://www.cgiar.org/cifor/research/projects/effect-crisis.html> (diakses Februari 10, 2010), p. 2

agregat di Indonesia meningkat dari 11% pada tahun 1996 menjadi 14-20% pada tahun 1998.⁵

Dari total utang luar negeri per Maret 1998 yang mencapai 138 milyar dollar AS, sekitar 72,5 milyar dollar AS adalah utang swasta yang dua pertiganya jangka pendek, di mana sekitar 20 milyar dollar AS akan jatuh tempo dalam tahun 1998. Sementara pada saat itu cadangan devisa tinggal sekitar 14,44 milyar dollar AS. Terpuruknya kepercayaan ke titik nol membuat rupiah yang ditutup pada level Rp 4.850/dollar AS pada tahun 1997, meluncur dengan cepat ke level sekitar Rp 17.000/dollar AS pada 22 Januari 1998, atau terdepresiasi lebih dari 80 persen sejak mata uang tersebut diambangkan 14 Agustus 1997. Pendapatan per kapita yang mencapai 1.155 dollar/kapita tahun 1996 dan 1.088 dollar/kapita tahun 1997, menciut menjadi 610 dollar/kapita tahun 1998, dan dua dari tiga penduduk Indonesia disebut Organisasi Buruh Internasional (ILO) dalam kondisi sangat miskin pada tahun 1999 jika ekonomi tak segera membaik.⁶

Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan, perekonomian yang masih mencatat pertumbuhan positif 3,4 persen pada kuartal ketiga 1997 dan nol persen kuartal terakhir 1997, terus menciut tajam menjadi kontraksi sebesar 7,9 persen pada kuartal I 1998, 16,5 persen kuartal II 1998, dan 17,9 persen kuartal III 1998. Demikian pula laju inflasi hingga Agustus 1998 sudah 54,54 persen, dengan angka inflasi Februari mencapai 12,67 persen.

Di pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Jakarta (BEJ) anjlok ke titik terendah, 292,12 poin, pada 15 September 1998, dari 467,339 pada awal krisis 1 Juli 1997. Sementara kapitalisasi pasar menciut drastis dari Rp 226 triliun menjadi Rp 196 triliun pada awal Juli 1998.⁷

Di pasar uang, dinaikkannya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) menjadi 70,8 persen dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) menjadi 60 persen

⁵ Poppele *et al.* 1999:14, *Ibid*, p. 2

⁶ *Laporan Akhir Tahun Bidang Ekonomi: Krisis Ekonomi 1998, Tragedi tak Terlupakan.* (1998, Desember 21). Dipetik Maret 2, 2010, dari www.seasite.niu.edu:

http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Reformasi/Krisis_ekonomi.htm

⁷ *Ibid*

pada Juli 1998 (dari masing-masing 10,87 persen dan 14,75 persen pada awal krisis), menyebabkan kesulitan bank semakin memuncak. Perbankan mengalami *negative spread* dan tak mampu menjalankan fungsinya sebagai pemasok dana ke sektor riil.⁸

Berbeda dengan dampak krisis finansial Asia 1997-1998 yang besar seperti dijelaskan di atas, menurut data badan pusat statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis global 2008 yaitu pada laporan pertumbuhan ekonomi 2009 adalah sebesar 4,5% terjadi pada pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 15,7 persen, diikuti oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga 4,9 persen, dan pembentukan modal tetap bruto 3,3 persen. Sedangkan komponen ekspor tumbuh minus 9,7 persen, dan impor minus 15,0 persen.⁹

Secara umum pencapaian indikator ekonomi makro nasional dalam tahun 2008 masih baik, walaupun dalam beberapa bulan terakhir mendapat tekanan yang cukup berat sebagai imbas krisis keuangan global. Hal ini dapat dilihat pada realisasi APBN-P tahun 2008 yang menunjukkan: (a) Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2008 yang masih dapat dipacu hingga ke 6,2% (APBN-P : 6,4%), walaupun dalam triwulan III dan perkiraan di triwulan IV mulai mengalami perlambatan, (b) Tingkat inflasi yang masih terkendali di sekitar 11,4% (APBN-P : 6,5%), dengan menjaga kelancaran dan kecukupan pasokan barang & jasa serta langkah penurunan harga BBM sebanyak dua kali di bulan Desember 2008, (c) Suku Bunga SBI-3 bulan sebagai basis perhitungan bunga obligasi Pemerintah yang diperkirakan rata-rata 9,3% (APBN-P : 7,5%), dan nilai per bulan cenderung menurun sejalan dengan berkurangnya tekanan inflasi, (d) Nilai tukar Rupiah diperkirakan rata-rata Rp9.691/US\$ (APBN-P : Rp9.100/US\$) sebagai akibat tekanan depresiasi Rupiah di penghujung tahun 2008 ini, (e) Harga minyak mentah Indonesia sekitar rata-rata US\$96,8/barel (APBN-P : US\$95/barel), seiring dengan penurunan harga minyak mentah di pasar internasional di semester II 2008, (f) Lifting minyak mentah Indonesia yang dapat mencapai 931 ribu barel

⁸ Ibid

⁹ Badan Pusat Statistik. (2009, November 10). *PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TRIWULAN III-2009*. Dipetik Maret 2, 2010, dari www.bps.go.id: www.bps.go.id/brs_file/pdb-10nov09.pdf

per hari, yang berarti di atas targetnya di tahun 2008 (APBN-P : 927 ribu barel per hari).¹⁰

Berdasarkan perbandingan indikator-indikator di atas pasca krisis finansial Asia 1997-1998 dan krisis global 2008, maka pertanyaan penelitian yang kemudian muncul adalah “Mengapa krisis finansial Asia 1998 lebih hebat pengaruhnya terhadap ekonomi-politik RI dibanding krisis global 2008?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan perbedaan dampak kedua krisis yang pernah melanda Indonesia yaitu krisis finansial Asia 1997-1998 serta krisis Global 2008 terhadap Indonesia. Tesis ini akan merujuk pada penggunaan perspektif ekonomi politik dalam ranah hubungan internasional.

Krisis Finansial Asia 1997 secara jelas memiliki dampak yang signifikan terhadap Indonesia baik dalam sektor perekonomian, sosial maupun politik. Hal yang sama juga terjadi pada krisis Global 2008 dimana krisis ini juga kemudian menimbulkan dampak pada sektor ekonomi, sosial maupun politik meskipun dalam besaran yang jauh lebih kecil dari Krisis Finansial Asia 1997. Kedua krisis ini dilihat dari awal terjadinya dan proses menyebarnya krisis tidaklah sama. Krisis Finansial Asia 1997 sebagaimana namanya berpusat di negara-negara Asia dan memiliki dampak yang sangat besar terhadap negara-negara Asia termasuk Indonesia. Lain halnya dengan Krisis Global yang terjadi pada tahun 2008. Krisis yang diawali dari Amerika Serikat ini cenderung tidak mempengaruhi kondisi Indonesia secara keseluruhan. Kebijakan-kebijakan Pemerintahan yang diambil untuk mengatasi krisis global 2008 ini dianggap efektif untuk meredam penyebaran krisis di Indonesia.

¹⁰ Departemen Keuangan. (2009, Januari 1). *Indikator Ekonomi Makro Masih Baik*. Dipetik Maret 2, 2010, dari www.depkeu.go.id: www.depkeu.go.id/ind/Data/SP_01_010109.pdf

Secara substantif, krisis Finansial Asia 1997 menyerang hampir di seluruh sektor perekonomian Indonesia seperti mata uang, suku bunga perbankan, dan lain sebagainya. Sedangkan krisis Global 2008 hanya menyerang sistem perbankan Indonesia. Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul dari latar belakang kedua krisis ini adalah Apakah krisis Global 2008 memiliki dampak lebih hebat atau tidak sehebat dampak krisis Finansial Asia 1997 bagi RI?

Lebih lanjut penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui esensi perbandingan krisis tahun 1997 dan 2008 serta kekuatan dan kelemahan dari masing-masing Krisis guna merumuskan suatu jawaban yang hipotetis dari kedua krisis ini.

Untuk mempertajam penggunaan perspektif ekonomi politik, maka penulis dalam tesis ini akan menitikberatkan pada faktor-faktor non-ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dan berpengaruh pada kedua periode krisis tersebut. Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka pembaca dapat mengetahui serta memahami penyebab perbedaan resistensi Indonesia terhadap krisis finansial Asia 1997-1998 serta krisis Global 2008 ini dalam perspektif ekonomi politik.

1.4. Tinjauan Pustaka

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis melakukan tinjauan pustaka untuk memahami pengertian, indikator, penyebab serta kondisi yang ditimbulkan dalam krisis finansial baik yang terjadi pada tahun 1997-1998 maupun tahun 2008.

1.4.1. Model-Model Krisis Finansial

Guna memahami krisis finansial dengan baik, maka model-model krisis finansial menjadi penting untuk dilakukan pembahasan lebih mendalam. Model-model krisis sederhana dijelaskan berikut ini:

1.4.1.1. *First, Second, and Third Generation Crisis*

Karakteristik dari model krisis *First Generation* adalah krisis yang disebabkan oleh krisis nilai tukar atau krisis neraca pembayaran. Asumsi yang digunakan dalam model ini adalah bahwa negara dengan kondisi *small open economy* serta nilai tukar yang dianut adalah nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*). Dalam model ini dikemukakan bahwa pemerintah dalam menghadapi defisit neraca keuangannya diasumsikan akan menggunakan cadangan devisa terbatas yang dimilikinya untuk melakukan *peg* terhadap nilai tukar mata uang lokalnya. Kebijakan ini tentu saja akan menyebabkan kondisi ekonomi menjadi tidak stabil yang pada akhirnya akan mendorong para spekulan untuk secara besar-besaran melepaskan mata uang lokal ketika cadangan devisa negara tersebut mulai merosot tajam pada titik tertentu. Seiring dengan perkembangan ekonomi dunia, dalam pelaksanaannya, model krisis generasi pertama dinilai tidak relevan lagi untuk menjelaskan berbagai fenomena baru seperti *contagion effect* atau efek menular.¹¹

Model krisis *Second Generation* terjadi akibat aksi spekulasi sebagai dampak dari adanya perubahan yang kurang menguntungkan dari adanya sentimen pasar dan tidak ada keterkaitan langsung dengan kondisi fundamental ekonomi suatu negara. Asumsi yang digunakan dalam model ini adalah tersedianya opsi/pilihan yang sama bagi pemerintah pada pilihan perlu tidaknya untuk mempertahankan kebijakan *peg* terhadap nilai tukarnya melalui kebijakan makroekonomi berjangka pendek yang bersifat fleksibel dan mempunyai kredibilitas jangka panjang, karena pada akhirnya kebijakan ini akan memunculkan krisis yang disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa mempertahankan *parity* adalah lebih besar biayanya apabila pada saat itu pasar mempercayai bahwa kebijakan tersebut akan gagal.¹²

Sedangkan model krisis *Third Generation* merupakan gabungan antara krisis nilai tukar dengan krisis perbankan (*twin crisis*). Model krisis generasi

¹¹ Arifin, S. (2008). *Bangkitnya Perekonomian Asia Timur: Satu Dekade setelah Krisis*. Jakarta: PT. Elex Media Computindo.

¹² *Ibid*

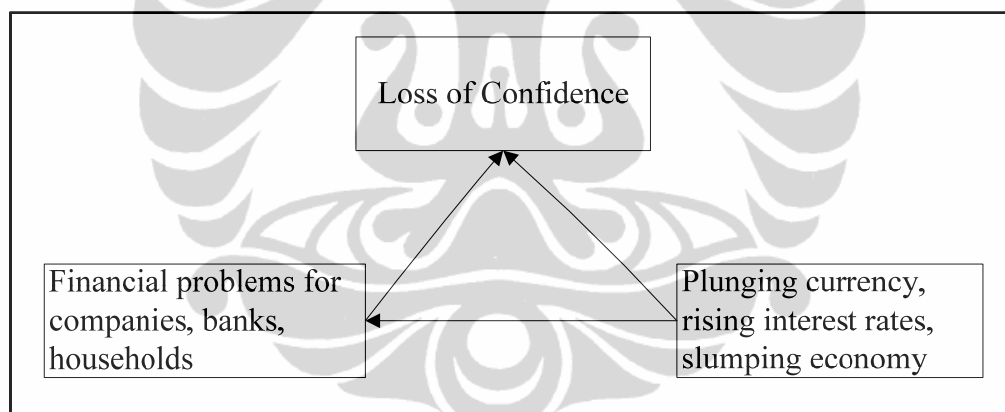
ketiga memandang penyebab krisis berasal dari turunnya permintaan kreditur asing terhadap aset keuangan domestik yang dipicu oleh hilangnya kepercayaan terhadap kemampuan negara, otoritas dan sistem perbankan atau perusahaan dalam melunasi segala bentuk kewajibannya termasuk utang luar negeri.¹³

Model krisis *Third Generation* ini muncul seiring dengan munculnya krisis finansial Asia 1997-1998. Model ini mampu menjelaskan kondisi negara-negara yang terdampak krisis termasuk Indonesia.¹⁴

1.4.1.2. Model Krugman

Gambar 1.1

Model Krisis Krugman¹⁵



Sumber: Zainudin Djafar. (2006). *Rethinking the Indonesian Crisis*.

Model krisis Krugman menjelaskan bahwa dengan menurun tajamnya nilai tukar mata uang, meningkatnya suku bunga, serta jatuhnya perekonomian akan berdampak pada permasalahan finansial untuk perusahaan-perusahaan, sektor perbankan serta sektor rumah tangga karena akan mengganggu neraca keuangan sektor-sektor ini. Kedua faktor ini kemudian akan menimbulkan hilangnya

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Dikutip dari Zainudin Djafar. (2006). *Rethinking the Indonesian Crisis*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, p.115

kepercayaan para investor terhadap kehidupan perekonomian Indonesia. Hal ini kemudian yang membuat dampak krisis finansial Asia terhadap Indonesia semakin besar. Berbeda halnya dengan yang terjadi pada krisis global 2008, nilai tukar rupiah serta tingkat suku bunga tidak mengalami gangguan sehingga tidak menimbulkan permasalahan keuangan pada sektor-sektor bisnis, perbankan serta rumah tangga. Baiknya kinerja perekonomian Indonesia sebelum terjadinya krisis Global 2008 kemudian tidak memunculkan hilangnya kepercayaan para investor sehingga dampak krisis tidak terlalu besar dirasakan oleh Indonesia.¹⁶

1.4.2. Krisis Finansial Asia 1997-1998

Krisis Finansial Asia dimulai di Thailand pada 2 Juli 1997 ketika Pemerintah Thailand memutuskan untuk menghentikan memproteksi Baht Thailand dan membiarkannya bersaing bebas dengan Dollar AS. Setelah kebijakan ini, Baht Thailand mengalami nilai tukar yang tidak stabil terhadap Dollar AS dan serangan bertubi-tubi dari para spekulasi mata uang. Sistem nilai tukar tetap yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Thailand selama kurun waktu tiga tahun sebelum krisis tidak mampu menjaga nilai tukar Baht terhadap Dollar AS. Oleh karena itu, sistem yang berlaku di Thailand tidak dapat menghadapi tekanan potensial yang besar yang muncul akibat dari jumlah pinjaman jangka pendek yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat perbankan dan lembaga keuangan di Thailand.¹⁷

Dari awal krisis, Lawrence B. Krause menganggap krisis Indonesia tidak hanya karena permasalahan nilai tukar mata uang (nilai tukar rupiah jatuh pada tahun 1997), utang luar negeri jangka pendek (jumlah hutang luar negeri terlalu banyak), dan kerapuhan finansial (pada pertengahan 1990-an setiap grup perusahaan swasta besar Indonesia memiliki *in-house bank*). Banyak dari kredit ini dipergunakan untuk mendanai proyek jangka panjang, sementara bank mendapatkan sumber dana dari pinjaman jangka pendek. Namun Indonesia juga

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid, p. 70

mengalami kelemahan struktural yang serius dalam lembaga politiknya dibandingkan Thailand, Malaysia, dan Filipina. Secara praktis, permasalahan nyata yang muncul di lembaga politik Indonesia merupakan kegagalan dalam mengelola krisis.¹⁸

Karakteristik pinjaman jangka pendek adalah pinjaman dengan jangka waktu tiga tahun atau kurang dengan tingkat bunga tetap, dan menggunakan mata uang asing.¹⁹ Sejak tahun 1980-an, banyak skandal, kolusi, komisi ilegal, dan korupsi meningkat secara signifikan dalam kegiatan bisnis dan pemerintahan di empat negara ASEAN yaitu Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kegiatan ini sulit dibasmi karena Pemerintah dan sektor swasta telah terikat didalamnya. Terdapat beberapa alasan: *pertama*, banyak elit pemerintahan memiliki relasi bisnis dengan sejumlah bank besar. *Kedua*, pejabat pemerintah seringkali meminta kontribusi khusus, seperti pendanaan untuk kampanye politik. *Ketiga*, perusahaan swasta tidak mampu menunjukkan laporan keuangan riil mereka karena banyaknya pembayaran komisi ilegal yang harus ditutupi. Terakhir, dalam menghadapi komisi ilegal, banyak bank besar berusaha untuk menghindari pajak. Sehingga, banyak perusahaan swasta besar mengabaikan kewajiban mereka untuk mengungkap laporan keuangan riil.²⁰

Dari sudut pandang IMF, beberapa faktor—baik domestik maupun eksternal—memiliki kontribusi penurunan sentimen investor asing dan domestik:

- Meningkatnya tekanan perekonomian, kenyataan bahwa terjadi defisit eksternal dan inflasi properti serta nilai pasar modal;
- Mempertahankan nilai tukar tetap, pada beberapa kasus berada pada tingkat yang tidak stabil, yang kemudian mempersulit respon kebijakan moneter terhadap tekanan-tekanan yang ada dan dianggap sebagai jaminan implisit dari nilai tukar, mendukung peminjam eksternal dan berakibat pada keterbukaan besar atas resiko nilai tukar asing baik bagi sektor finansial maupun perbankan;

¹⁸ Ibid, p. 3

¹⁹ Ibid, p.71

²⁰ Ibid, p. 77-78

- Kurangnya peraturan yang sesuai bagi pengawasan sistem keuangan, ditambah dengan praktek peminjaman langsung dari pemerintah yang berakibat pada penurunan tajam kualitas portofolio pinjaman bank;
- Masalah-masalah akibat dari terbatasnya ketersediaan data dan kurang transparan, hal-hal tersebut dapat mengaburkan pandangan pelaku pasar terhadap kondisi nyata dari fundamental ekonomi; dan
- Permasalahan ketidakpastian pemerintahan dan politik, yang memperburuk krisis kepercayaan, ditambah dengan keengganan kreditor asing untuk mengembalikan pinjaman jangka pendek, dan berakibat pada tekanan penurunan mata uang dan pasar saham.²¹

Terdapat kontradiksi dalam hubungan yang tampak sebagai ‘win-win’ antara Wall Street dan pasar finansial global. Sebagai contoh, kelayakan pasar finansial internasional sangat bergantung pada kesehatan dan stabilitas pasar finansial tanpa memperhatikan lokasi mereka. Robin Rubin menyatakan atas reaksi terhadap runtuhnya perekonomian Indonesia pada tahun 1997, stabilitas finansial di seluruh dunia berhubungan signifikan dengan keamanan nasional dan kepentingan ekonomi Amerika Serikat. Oleh karena itu, dengan setiap kehancuran pada *emerging markets*, premis neo-klasik bahwa *Washington Consensus* – khususnya pada keseimbangan antara mobilitas bebas modal dan kesejahteraan yang berkesinambungan – menjadi sangat sulit untuk dilegitimasi. Krisis Asia dan efeknya menunjukkan titik balik dari banyak pembuat kebijakan dan para ahli neoliberal yang menghasilkan *Washington Consensus*.²²

Washington consensus mengindikasikan bahwa kapitalisasi dan privatisasi merupakan sebuah formula bagi kemajuan perekonomian suatu negara. Pada awalnya Inggris sebagai negara yang pertama kali menerapkan kebijakan denasionalisasi atas aset-aset BUMNnya. Hal ini dilakukan guna menekan anggaran negara dalam membiayai BUMN-BUMN tersebut serta merangsang

²¹ IMF Staff, “The Asian Crisis: Causes and Cures,” *Finance & Development*, Volume 35, Number 2, June 1998 diakses dari <http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/index.htm>

²² Soederberg, Susanne, “On the Contradictions of the New International Financial Architecture: Another Procrustean Bed for Emerging Markets?,” *Third World Quarterly*, Vol 23, No. 4 (Aug., 2002), Taylor & Francis, Ltd., p. 609-610

sektor swasta untuk dapat mengembangkan potensi bisnis yang ada. Selain privatisasi, aliran bebas modal juga turut digagas dalam *Washington Consensus*. Aliran bebas modal dianggap akan memberi keuntungan bagi masyarakat karena dengan adanya aliran bebas modal ini maka suatu negara diharapkan akan mampu melakukan pembangunan pesat secara ekonomi. Namun, resep-resep yang ditawarkan dalam *Washington Consensus* ini kenyataannya tidak sukses diterapkan di negara-negara yang terkena dampak krisis termasuk Indonesia. Kepentingan AS terhadap Indonesia yang menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar ekspor mereka kemudian menjerumuskan Indonesia lebih dalam krisis karena konsumsi masyarakat terhadap barang ekspor kemudian menjadi lemah akibat tingginya kurs Dollar AS sehingga kemampuan konsumsi masyarakat menurun secara signifikan. Tentunya penurunan signifikan dalam konsumsi ini turut memberikan kerugian bagi AS.

1.4.3. Krisis Global 2008

Sampai saat ini, pemahaman lama diantara para pembuat kebijakan adalah bahwa negara berkembang disarankan untuk mengikuti contoh dari negara-negara maju dan menghilangkan kontrol modal. Teori ekonomi menyarankan beberapa alasan mengapa aliran bebas dana baik bagi pertumbuhan ekonomi. Pertama, karena perdagangan bebas memungkinkan efisiensi alokasi barang, aliran bebas dana memfasilitasi investasi dikirim untuk penggunaan yang paling produktif tanpa memperhatikan batasan geografis atau politik. Argumen ini menyarankan modal harus mengalir dari negara maju ke negara berkembang, karena negara maju memiliki investasi yang lebih tinggi, sementara negara berkembang memiliki kesempatan investasi yang menguntungkan. Kedua, mobilitas modal memungkinkan negara untuk menjamin negaranya sendiri terhadap kejatuhan tiba-tiba dalam penerimaan ekspor atau kejatuhan finansial lainnya dari luar negeri. Ketiga, aliran modal asing, khususnya investasi langsung, memungkinkan

negara untuk mengimpor teknologi dan keahlian asing, yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonominya.²³

Menurut Bank Indonesia:

1. Apa yang kita lihat sekarang adalah dampak dari gelembung pasar keuangan yang pecah.
2. Implikasi yang paling menonjol:
 - a. Keketatan likuiditas (*Liquidity squeeze*) yang disebabkan oleh kepercayaan yang anjlok dan sistem kredit yang macet.
 - Dana di tarik dari *Emerging Markets* (terutama Cina) ke pusat-pusat keuangan di AS dan negara-negara industri lain.
 - *Liquidity Squeeze* ini merembet dari episentrum-nya, dari Amerika Serikat, ke Eropa dan Asia. Pengaruh atau implikasi berkesinambungan (*Contagion effects*) ini sedang berjalan.
 - b. Resesi dunia, dengan implikasinya terhadap pertumbuhan dan ekspor negara-negara berkembang.²⁴

Implikasi bagi perekonomian Indonesia:

1. Sampai saat ini, pengaruh gejolak di lembaga keuangan internasional bagi perbankan nasional minimal.
 - Pemilikan surat berharga lembaga keuangan internasional yang bermasalah oleh perbankan nasional sangat kecil.
 - Keadaan industri perbankan kita sampai saat ini solid.
2. Sebagai akibat keketatan likuiditas (*liquidity squeeze*) di pasar keuangan internasional, akan terjadi keketatan likuiditas devisa dan *credit line* devisa

²³ Beddoes, Zanny Minton, "The International Financial System," *Foreign Policy*, No. 116 (Autumn, 1999), Washingtonpost. Newsweek Interactive, LLC, p. 17-18

²⁴ Lihat Krisis Keuangan AS dan dampaknya pada Perekonomian Indonesia: -Sebagai Background Informasi-, Jakarta-Oktober 2008, p. 8

di pasar internasional dalam 6 bulan sampai 1 tahun yang akan datang, dan akan mempengaruhi pasar domestik

- Keketatan likuiditas dollar ini dirasakan oleh semua negara, termasuk Amerika Serikat sendiri. Perbankan, dunia usaha. Kebijakan moneter perlu menyesuaikan terhadap realitas baru ini.²⁵

Pemerintah optimistis gejolak keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 tidak akan mengakibatkan Indonesia mengalami krisis ekonomi seperti tahun 1997-1998 lalu. Presiden menjelaskan, pada 1998 terjadi transisi politik serta salah kelola pemerintahan sehingga muncul ketidakpercayaan yang memicu kepanikan. SBY yakin faktor-faktor pemburuk yang menyebabkan krisis ekonomi tersebut saat ini tidak ada lagi. Presiden optimistis kebijakan, prioritas, serta tren perekonomian Indonesia berada di jalur yang tepat. Hal itu ditandai oleh perbaikan pendapatan per kapita serta menurunnya rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi tetap berada pada kisaran 6%.²⁶

Presiden menekankan agar Indonesia tidak menyalakan momentum pertumbuhan ekonomi dan meminta agar pasar domestik tidak diabaikan serta konsumsi diperluas sehingga bisa menggerakkan ekonomi dalam negeri. Presiden juga mengingatkan, 2008 dan 2009 adalah tahun politik. Untuk itu ia meminta agar dilaksanakan politik yang tidak partisan dan mendahulukan kepentingan rakyat.²⁷

1.5. Kerangka Teori

Sistem ekonomi kapitalis sampai saat ini masih dianggap sebagai sistem yang paling berhasil mendatangkan kesejahteraan. Namun sistem kapitalis internasional tidak dapat bertahan tanpa kepemimpinan yang kuat dan bijaksana. Kepemimpinan internasional harus dapat mempromosikan kerjasama

²⁵ Ibid, p.9

²⁶ http://politik.vivanews.com/news/read/134022-keunggulan_penanganan_krisis_2008_menurut_sby. (2008, Oktober 07). Dipetik November 2010, dari <http://politik.vivanews.com/>.

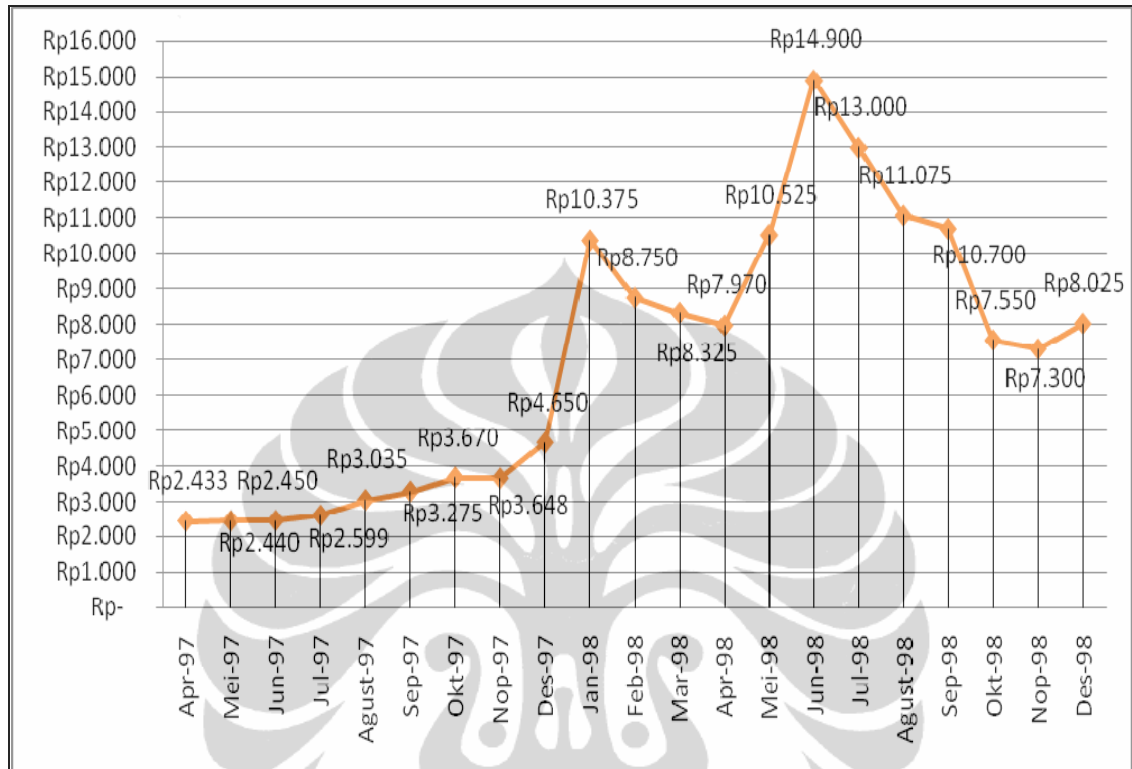
²⁷ Ibid

internasional untuk membangun dan mendukung aturan-aturan mengenai perdagangan, investasi luar negeri, dan permasalahan moneter internasional. Namun, kepemimpinan internasional ini juga harus dapat memastikan terdapatnya proteksi minimal terhadap pelaku pasar yang mungkin dirugikan atas tekanan pasar dan dari proses kehancuran. Mereka yang dirugikan diharapkan masih dapat mempercayai bahwa sistem ini berlangsung secara adil.

New American Economy (NAE) dibentuk dari beberapa pembangunan penting termasuk membebaskan pasar dari kebijakan Pemerintah, penurunan jumlah dan restrukturisasi perusahaan Amerika serta kemajuan teknologi yang pesat. Didorong berbagai perkembangan politik, ekonomi, dan teknologi, sistem perekonomian dunia telah berpindah dari sistem ekonomi internasional yang terbagi secara tajam pada Perang Dingin menjadi sistem perekonomian kapitalis yang semakin terintegrasi. Amerika Serikat sejak awal tahun 1990an sangat bergantung pada pasar ekspor serta investasi dari luar negeri. Pangsa pasar ekspor Amerika Serikat yang cukup besar adalah negara-negara *emerging markets* di Asia Timur sehingga Amerika Serikat sendiri memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap ekonomi global. Ketika Jepang, Eropa Barat, dan *emerging markets* di Asia Timur bertumbuh pesat sepanjang tahun 1990an, harga komoditi dunia akan meningkatkan tekanan inflasi serta menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Dapat dikatakan bahwa pondasi perekonomian AS pada tahun 1990an sudah cukup baik, namun hal ini tidak terlepas dari pengaruh krisis finansial Asia 1998 yang menjadikan nilai mata uang AS melambung tinggi, sehingga AS dapat meraup keuntungan berlipat ganda dari kondisi krisis yang menimpa *emerging markets*. Ini diperlihatkan dengan fluktuasi nilai dollar AS yang cukup signifikan sebagaimana dijelaskan dalam gambar 1.2.

Gambar 1.2

Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Rupiah terhadap Dollar AS 1997/98



Sumber: Data Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Bank Indonesia²⁸

Krisis ekonomi Asia pada akhir 1990an yang dimulai dari Thailand pada Juli 1997 merefleksikan dampak pertumbuhan ekonomi global terhadap ekonomi politik internasional. Pada tahun 1980-an, tidak pernah dibayangkan bahwa krisis finansial yang berasal dari ekonomi Asia Tenggara yang kecil dapat merugikan tidak hanya Amerika Serikat tapi juga belahan dunia lainnya. Ekonomi internasional yang stabil dan sejahtera (seperti ekonomi domestik) membutuhkan pondasi politik yang kuat dan stabil guna mengikat lembaga dan hukum yang mengatur sistem tersebut serta untuk mencegah permasalahan meningkat menjadi krisis seperti pasca krisis finansial 1997. Meskipun perkembangan teknologi dan

²⁸ Bank Indonesia. http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Statistik/Default_SEKI_ID.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID={F24C392F-6565-43E0-915F-AAFB10F31BFC}&NRORIGINALURL=/web/id/Statistik/Statistik%2bEkonomi%2bdan%2bKeuangan%2bIndonesia/Data%2bQuery/%3fsec%3d8&NRCACHEHINT=Gues. Dipetik November 15, 2010, dari www.bi.go.id.

kekuatan pasar yang saling mempengaruhi dapat menjadi alasan yang cukup untuk peningkatan integrasi ekonomi dunia, dukungan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara-negara yang kuat dan hubungan kooperatif diantara para negara tersebut dapat membentuk sebuah pondasi politik yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan integrasi ekonomi dunia. Hukum internasional (regime) yang mengatur permasalahan ekonomi internasional tidak dapat berhasil kecuali didukung oleh dasar politik yang kuat. Kapitalisme global dan globalisasi ekonomi bersandar pada pondasi politik yang kuat.²⁹ Hal ini sangat berkaitan erat dengan pola penanganan krisis dalam sebuah negara atau integrasi ekonomi. Efektifitas kebijakan yang dihasilkan akan mampu memproteksi efek dari sebuah krisis terhadap negara-negara tersebut.

Pada tahun 1980an, Amerika mengalami periode keemasan karena tingginya nilai dollar yang kemudian menurunkan biaya barang-barang produksi luar negeri. Eksportir Amerika sangat menderita akibat tingginya nilai dollar dan permintaan proteksi perdagangan. Dengan tingginya nilai dollar maka kemampuan konsumen dalam membeli barang-barang hasil produksi Amerika akan mengalami penurunan yang signifikan, sehingga berdampak pada kuota ekspor yang semakin menurun dan berimbas pada menurunnya pendapatan para eksportir itu sendiri.³⁰

Ketika nilai dollar mengalami fluktuasi, sebagaimana sering terjadi, disadari atau tidak, jutaan warga Amerika terkena dampaknya. Dan apabila sistem moneter internasional mengalami kejatuhan seperti pada tahun 1930an, kehancuran akan terjadi. Sistem keuangan internasional sangat lemah dan dapat menyebabkan krisis ekonomi internasional seperti yang terjadi pada akhir 1990an. Instabilitas moneter dan gangguan finansial dapat menyebabkan dampak buruk bagi kehidupan individu dan terhadap ekonomi global.³¹ Sistem keuangan internasional yang banyak digunakan saat ini adalah sistem kapitalis dimana mempersyaratkan adanya *invisible hand* dimana besaran harga ditentukan oleh pasar, baik barang produksi maupun nilai mata uang suatu negara. Namun, resiko

²⁹ Gilpin, Robert, *The Challenge of Global Capitalism: The World Economy in the 21st Century*, Princeton University Press: Princeton, 2000, p. 3-13

³⁰ Ibid, p. 114

³¹ Ibid, p.114

kerugian dalam penerapan sistem ini sangatlah besar ketika para spekulasi mulai melakukan aksi *short selling* atas mata uang suatu negara sehingga perekonomian suatu negara dalam hal ini terkait dengan nilai tukar mata uang akan sangat bergantung pada pasar dan tidak dapat diprediksi pergerakannya.

Di Asia Tenggara, krisis memiliki tantangan besar yang disebut sebagai *ASEAN model*, dimana keamanan amat ditentukan oleh kepentingan dalam ekonomi dan politik, bukan pada terminologi militer. Karakteristik utama model ini adalah konsep *national resilience* yang digagas oleh Indonesia. Kondisi ideal ini dapat dicapai dengan menciptakan tatanan politik domestik yang stabil yang dapat mendukung pembangunan ekonomi produktif. Sebaliknya, pembangunan ekonomi ini akan menyokong tatanan politik fundamental. Sehingga, jatuhnya kesejahteraan ekonomi di Asia akan mengancam dasar stabilitas politik di sepanjang kawasan.³²

Indonesia mengalami kemunduran ekonomi yang sangat besar selama terjadinya krisis finansial Asia. Indonesia merupakan negara yang mengalami dampak krisis terburuk di kawasan Asia Tenggara. Pada fase pertama krisis, Indonesia menghadapi permasalahan finansial, yang menghubungkan satu aspek (ekonomi) dan aspek lainnya (politik). Selama periode 6 bulan dari Juli hingga Desember 1997, pemerintah Indonesia tetap tidak mau melakukan tindakan serius untuk meminimalisir permasalahan finansial karena Soeharto tampaknya yakin apabila ada tindakan tegas untuk mengatasi krisis ini maka akan membahayakan bagi kelangsungan dan kepentingan ekonomi politik regimnya. Politik menjadi sangat penting bagi resolusi permasalahan Indonesia. Permasalahan utama bagi Indonesia, yaitu mundurnya Soeharto, dan perubahan politik di Indonesia setelah krisis menjadi lebih signifikan akibat juga terjadinya perubahan kepentingan AS di Indonesia. Bagi AS kawasan Asia Tenggara dan Indonesia telah menjadi ujung

³² Difuntorum, Manuel C., "The Political and Social Implication of the Asian Crisis" diakses dari <http://journals.upd.edu.ph/index.php/kasarinlan/article/download/381/349>, p. 36-37

tombak bagi kepentingan ekonomi negara-negara Barat termasuk perkembangan moneter dan keuangannya.³³

Permasalahan finansial internasional tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada operasi pasar bebas, namun beberapa aturan atau mekanisme untuk mengatur aliran modal di Asia Tenggara tetap harus diberlakukan. Akibatnya, terdapat empat tindakan substansial yang harus dilaksanakan secara konsisten. Pertama, Bank sentral di sebagian besar negara Asia Tenggara harus lebih aktif dalam mengatur Bank serta likuiditas. Kedua, Kepemimpinan perusahaan harus ditingkatkan. Ketiga, khususnya Indonesia, negara tersebut memerlukan peraturan yang jelas dan tegas untuk membantu para pengusaha kecil dan menengah. Akhirnya tidak dapat diabaikan bahwa cukup penting untuk menghilangkan keberadaan pemerintahan otoriter dalam upaya meningkatkan iklim politik kondusif yang mendukung demokrasi yang pro kepentingan rakyat banyak.³⁴

Menurut Hyman Minsky, krisis finansial merupakan karakteristik natural dari sistem kapitalis, dan krisis ini mengikuti jalur yang terlihat dan sudah diprediksi. Hal ini mengarah pada krisis finansial yang dimulai dengan apa yang disebut oleh Minsky sebagai *displacement* atau *external shock* terhadap ekonomi; *external shock*, yang pasti besar dan bertahan, dapat memiliki bentuk yang berbeda sebagai permulaan dari perang, penahan, atau kalah, atau inovasi dan difusi teknologi baru yang penting. Para ahli ekonomi menolak model krisis finansial Minsky karena mereka percaya tidak ada model umum krisis finansial yang dapat diformulasikan, karena setiap krisis unik atau memiliki karakteristik khusus dimana model khusus diperlukan. Kritikan lainnya adalah bahwa model krisis finansial Minsky mengasumsikan bahwa krisis seperti ini berasal dari ketidakpastian, spekulasi, dan instabilitas.³⁵

Kejatuhan finansial dan ekonomi tahun 2008 merupakan kemunduran geopolitik yang besar bagi AS dan Eropa. Kehancuran ini menjadikan model

³³ Zainuddin Djafar, *Rethinking the Indonesian Crisis*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 2006, p.99-106

³⁴ Ibid

³⁵ Gilpin, Robert, *Global Political Economy: Understanding the International Economy Order*, Princeton University Press: Princeton, 2001, p. 264-270

kapitalisme pasar bebas AS dipertanyakan. Sistem keuangan yang liberal dan mewadahi sistem ekonomi kapitalis ini memudar dan kerangka kebijakannya gagal untuk dapat mengontrol dengan baik perihal penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan untuk kepentingan pribadi (pengelola kredit perbankan, pengusaha properti, dan mereka yang melakukan penilaian atas layaknya suatu badan usaha atau perorangan menerima pinjaman atau tidak).³⁶

1.6. Hubungan Antar Variabel

Dalam penelitian ini, penulis menghubungkan antara dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen.

Perbedaan dampak krisis finansial Asia 1997-1998 dan krisis global 2008 tidak hanya seperti dijelaskan dalam sub bab 1.2 yaitu berdasarkan indikator makro ekonomi, indikator-indikator non-ekonomi juga turut mempengaruhi dampak krisis finansial terhadap Indonesia. Menurut data dari Bank Dunia, terdapat 6 (enam) indikator politik³⁷ yang dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan dampak krisis finansial terhadap Indonesia. Keenam indikator ini adalah:

1. *Voice and accountability* yaitu tingkatan dimana warga negara suatu negara dapat berpartisipasi dalam memilih pemerintahan mereka, serta kebebasan berekspresi, berkumpul dan pers. Pada saat terjadinya krisis baik krisis finansial Asia 1998 serta krisis global 2008, indikator ini masih menunjukkan tingkat yang lemah. Hal ini dapat terlihat dari partisipasi Pemilu pada kedua periode tersebut. Sikap apatis masyarakat atas berhasilnya Pemilu masih rendah sehingga masyarakat menganggap

³⁶ Altman, R. (2009, January-February). The Great Crash, 2008: A Geopolitical Setback for the West. *Foreign Affairs*, p. 2-10.

³⁷ Indikator yang digunakan adalah indikator dari World Bank. "Governance Matters 2009: Worldwide Governance Indicators, 1996-2008." www.worldbank.org. Juni 2009. http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf_country.asp (diakses Maret 2010).

bahwa peran serta dalam Pemilu tidak akan memberikan banyak perubahan.

2. *Political stability* yaitu kemungkinan suatu pemerintahan terancam destabilisasi akibat berbagai model ancaman atau tindakan inkonstitusional, termasuk terorisme. Periode krisis 1998 sangat jelas menggambarkan bagaimana tidak stabilnya kondisi politik di Indonesia. Carut marut Pemerintahan Soeharto yang diwarnai dengan isu KKN serta kondisi perekonomian yang terdampak krisis menyebabkan kepercayaan masyarakat atas Pemerintahan Soeharto turun drastis. Ketidakstabilan politik ini kemudian berdampak pada turunnya Soeharto dari kursi Presiden. Berbeda dengan periode krisis global 2008 yaitu pada masa Pemerintahan SBY, kondisi politik relatif lebih stabil sehingga meskipun diterpa krisis global 2008, SBY dapat terpilih kembali dalam Pemilu Presiden tahun 2009.
3. *Government effectiveness* yaitu kualitas pelayanan masyarakat, kapasitas pelayanan sipil dan kemerdekaan dari tekanan militer; kualitas dari formulasi kebijakan. *Government effectiveness* pada kedua periode krisis masih lemah, dimana birokrasi di Indonesia terkenal dengan birokrasi yang berbelit-belit. Reformasi birokrasi sudah mulai diusung pada Pemerintahan SBY namun budaya KKN yang sudah mengakar di setiap kementerian yang ada di Indonesia menjadi sebuah tantangan yang sangat sulit dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang akan mengantarkan Indonesia kepada negara yang memiliki birokrasi efektif, efisien, dan bersih dari pengaruh KKN.
4. *Regulatory quality* yaitu kemampuan pemerintah untuk menyediakan kebijakan dan regulasi yang dapat memfasilitasi dan mempromosikan pembangunan sektor swasta. Kualitas kebijakan Pemerintahan Indonesia dinilai masih lemah. Sebagai contoh lemahnya peraturan perundang-undangan Pemerintahan RI atas investasi asing yang masuk ke Indonesia. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia tidak bersedia

mengeluarkan jaminan atas investasi asing sehingga para investor asing masih ragu dalam menanamkan modal mereka di Indonesia karena tidak adanya jaminan tersebut. Hal ini terjadi baik dalam periode Pemerintahan Soeharto maupun Pemerintahan SBY.

5. *Rule of law* yaitu persepsi atas batasan unsur-unsur yang memiliki kepercayaan pada dan dipengaruhi oleh peraturan yang berlaku di masyarakat, khususnya kualitas pelaksanaan kontrak, hak-hak atas properti, kepolisian, kehakiman, serta kemungkinan terjadinya tindakan kriminal dan kekerasan. Pada masa pemerintahan Soeharto, *Rule of Law* tidak berjalan sebagaimana mestinya, Soeharto sebagai orang yang berkuasa pada masa itu menggunakan kekuasaannya untuk mengontrol hukum serta peraturan yang berlaku di masyarakat, sehingga hukum serta aparat pelaksana hukum berada di bawah kontrolnya. Setelah masa pemerintahannya berakhir terjadilah reformasi di segala bidang termasuk reformasi hukum. Namun, reformasi yang dielu-elukan tidak sepenuhnya mampu memperbaiki sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Pada masa Pemerintahan SBY masih banyak pelanggaran hukum yang dilegitimasi oleh para aparat penegak hukum, sehingga penerapan *rule of law* masih lemah pada kedua periode pemerintahan.
6. *Control of corruption* yaitu tingkatan dimana kekuasaan publik digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk bentuk-bentuk kecil dan besar dari korupsi, serta “dominasi” elite terhadap negara. Lemahnya kontrol atas korupsi terlihat jelas dalam Pemerintahan Soeharto. Dalam Pemerintahannya bahkan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) marak terjadi. Praktek KKN dilakukan oleh anak-anak Soeharto sendiri beserta kroni-kroninya dalam mengembangkan bisnis mereka. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Soeharto pada saat itu, mereka dapat dengan leluasa melakukan praktek KKN ini. Mendarahdagingnya praktek KKN di Indonesia tidak serta merta dapat dibersihkan dalam Pemerintahan SBY. Meskipun Pemerintahan SBY dengan tegas mengeluarkan kebijakan untuk mencegah praktek KKN, pada kenyataannya pejabat-pejabat “lama” yang

Universitas Indonesia

masih menduduki posisi strategis dalam Pemerintahan SBY belum dapat menghilangkan budaya KKN ini, sehingga praktek KKN belum sepenuhnya bersih dalam Pemerintahan SBY.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa Indonesia pada masa pasca krisis tidak hanya mengalami krisis dalam sektor ekonomi, namun juga menjalar sampai dengan krisis politik. Situasi pada saat itu (akhir 1997 dan 1998) sangat tidak kondusif, penjarahan terjadi di berbagai daerah, demonstrasi mahasiswa yang meluas sehingga menimbulkan korban jiwa. Mahasiswa berhasil membalikkan opini masyarakat bahwa Pemerintahan baru Soeharto tidak dapat mengatasi krisis Indonesia. Otoritas militer aliansi politik utama Soeharto, juga tidak mampu menghentikan protes dan demonstrasi mahasiswa. IMF menekan Pemerintahan Soeharto dan bantuan finansial tidak datang sampai dengan awal tahun 1998. Oleh karena itu, reformasi politik dan ekonomi sangat signifikan diperlukan bagi Indonesia. Perilaku KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) merajalela di era pemerintahan Soeharto yang mengakibatkan kesenjangan perekonomian serta terpuruknya Indonesia dalam krisis perekonomian. Kondisi ini kemudian membawa Indonesia pada situasi politik yang makin tidak stabil dan ditandai dengan pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998. Pengunduran diri ini tidak serta merta mengeluarkan Indonesia dari multi krisis, Indonesia bahkan mengalami dampak krisis yang jauh lebih parah dari negara-negara lain akibat kondisi politik ini.

Kegagalan Pemerintah Soeharto dalam mengatasi krisis sangat mengkhawatirkan bagi para elit dan pada saat yang sama kesetiaan mereka semakin menipis pada Pemerintahan Soeharto. Sebagian besar elit Pemerintahan berasal dari Partai Golkar (partai berkuasa) yang mengontrol keseluruhan birokrasi pusat dan daerah. Kesetiaan para elit khususnya terpusat pada uang dan kekuasaan, dan prinsip mereka tidak didasari oleh ideologi khusus. Pada bulan Maret 1998, partai Golkar masih menaruh kepercayaan pada Soeharto dengan memberikan dukungan penuh pada sidang umum MPR. Namun dua bulan kemudian (19 dan 20 Mei 1998) terdapat dua event politik yang mengalihkan kepercayaan partai Golkar terhadap Presiden Soeharto. Pertama Harmoko Ketua

Universitas Indonesia

MPR pada tanggal 18 Mei 1998 membuat pernyataan ‘Demi kepentingan rakyat dan persatuan negara, Soeharto harus mengundurkan diri dengan cara terhormat.’ Kedua, adanya pengunduran diri dari 14 menteri bidang ekonomi, keuangan, dan sektor industri, diawali oleh Menteri Koordinator Ekonomi dan Industri, dan Kepala Bappenas, Ginandjar Kartasasmita, mereka menyatakan tidak bersedia untuk masuk dalam jajaran kabinet baru yang akan dibentuk oleh Soeharto pada malam hari tanggal 20 Mei 1998. Pada akhirnya Soeharto tidak dapat melanjutkan kekuasaannya dua bulan setelah terpilih kembali pada awal Maret 1998.³⁸

Tentara merupakan kekuatan utama Angkatan Bersenjata Indonesia (ABRI) dan menjadi struktur politik utama bagi kekuasaan Soeharto. Pengaruh politik ABRI dalam dunia perpolitikan Indonesia sangat besar sejak tahun 1950an. Hubungan Soeharto dengan para pemimpin ABRI tidak sesolid hubungan pada tahun 1960an dan 1970an. Sejak awal 1990an pengaruh Soeharto pada para Jenderal yang memegang kekuasaan tertinggi di ABRI dipengaruhi oleh perbedaan pendapat. Perbedaan kepentingan jelas terjadi antara Soeharto dan para Jenderal dan krisis ekonomi semakin memperburuk hubungan keduanya. Sejak awal 1998, banyak Jenderal mengkritisi respon Soeharto terhadap krisis, Soeharto dinilai kurang konsisten, tidak transparan, terlalu lambat, dan gagal untuk membuat prioritas atas permasalahan perekonomian rakyat. Oleh karena itu, ketika krisis menjadi sangat akut, pada Maret-April 1998, sebagian besar Jenderal di ABRI dan BAKIN kehilangan simpati pada Soeharto.³⁹

Berbeda halnya dengan kondisi politik pada periode krisis 1997-1998, kondisi politik Indonesia pada saat terjadinya krisis Global 2008 relatif lebih stabil. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden yang berkuasa pada saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono masih tinggi sehingga kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam penanganan krisis dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti dapat dilihat dari salah satu contoh kasus pengambilan kebijakan pada saat krisis, yaitu penanganan kasus Century.

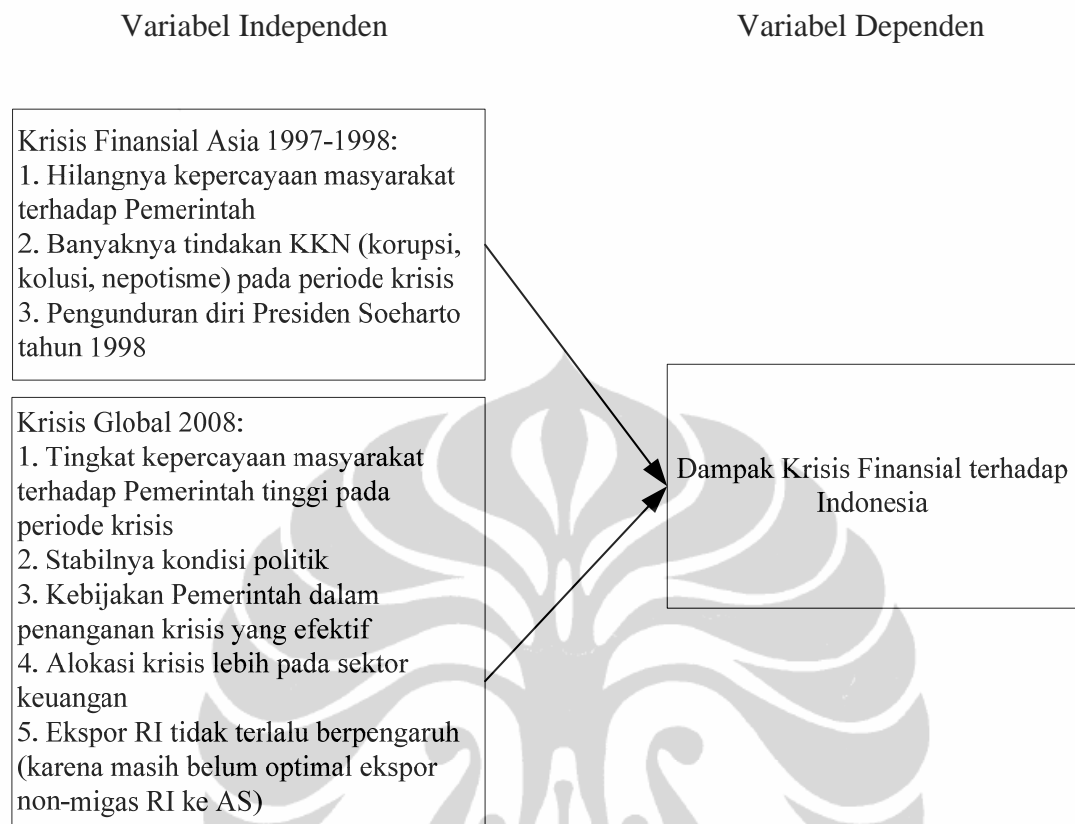
³⁸ Zainuddin Djafar, *Rethinking the Indonesian Crisis*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 2006, p. 284

³⁹ Ibid

Pada tahun 2008, menanggapi adanya gejolak perekonomian di AS, Indonesia melakukan langkah antisipatif pada sektor perekonomian khususnya sektor perbankan. Dalam melakukan tindakan antisipatif tersebut, SBY membentuk suatu Komite yang diberi nama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau lebih dikenal dengan KSSK. KSSK ini kemudian diketuai oleh Menteri Keuangan yang menjabat saat itu yaitu Sri Mulyani. Salah satu kebijakan yang dihasilkan melalui Komite ini adalah kebijakan terkait Bank Century yang dikeluarkan pada tahun 2008. Kebijakan diambil karena melalui evaluasi KSSK, Bank Century dinyatakan sebagai Bank berdampak sistemik, yang artinya apabila Bank Century ini mengalami kebangkrutan maka akan mengganggu stabilitas sektor perbankan Indonesia.

Berlatarbelakang dari masih tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan SBY, kebijakan ini kemudian tidak mendapat reaksi negatif dari masyarakat. Pada tahun 2009 sebagaimana dinyatakan SBY sebagai tahun politik, intrik-intrik politik kemudian mulai bermunculan. Intrik-intrik politik yang bermunculan sangat berkaitan dengan pencitraan SBY dalam Pemilu Presiden langsung yang diselenggarakan pada bulan April 2009. Dengan semakin tingginya gejolak politik yang mulai muncul ke permukaan, maka kebijakan-kebijakan yang telah dihasilkan selama pemerintahan SBY periode 2004-2009 serta merta menjadi hangat dibicarakan kembali. Kasus Century mulai terkuak ketika DPR yang beranggotakan berbagai partai politik serta kalangan lainnya menemukan kejanggalan dalam skema pengucuran dana guna penyelamatan bank Century ini. Skema dana yang seharusnya hanya senilai 682 miliar kemudian meningkat fantastis menjadi 6,7 triliun. Peningkatan signifikan ini kemudian menjadi pertanyaan karena untuk menyelamatkan bank “kecil” seperti Bank Century, skema pengucuran dana dianggap terlalu besar.

1.7. Model Analisis



1.8. Asumsi

Asumsi dari model analisis di atas adalah selain faktor-faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi besaran dampak krisis terhadap suatu negara, faktor-faktor non-ekonomi juga turut berperan penting dalam mempengaruhi besaran dampak krisis terhadap suatu negara. Dengan kontrol yang baik terhadap indikator-indikator tersebut maka pengaruh krisis akan lebih mudah teratasi.

Dari kedua krisis 1998 dan 2008, dampak, reaksi, serta penyebabnya berbeda sehingga kontrol atau faktor yang bersifat non-ekonomi lebih penting bagi krisis 1998 dibandingkan dengan krisis 2008.

1.9. Hipotesa

Kesimpulan sementara yang dapat ditarik dari asumsi di atas adalah dengan semakin baiknya kondisi perpolitikan di Indonesia maka dampak krisis yang ditimbulkan juga akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya, apabila kondisi perpolitikan di Indonesia memburuk maka dampak krisis finansial turut meningkat.

Dalam krisis 1998, krisis yang terjadi lebih bersifat multi dimensi yaitu krisis terjadi di berbagai bidang. Tidak hanya krisis ekonomi namun juga menjalar menjadi krisis politik dan krisis sosial. Sedangkan krisis 2008 lebih terisolir pada sektor keuangan dan moneter. Krisis 2008 ini kembali mengingatkan bahwa sektor riil makin penting peranannya dalam perekonomian Indonesia.

1.10. Metodologi Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan merupakan sebuah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan petikan atau keseluruhan dokumen, surat-menyurat, rekaman, dan kasus sejarah.⁴⁰

1.11. Metode Penulisan

Metode penulisan tesis ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah penelitian yang dilakuakn dilakukan dengan menggambarkan obyek penelitian pada suatu periode berdasarkan fakta yang telah ada dan jelas. Fakta yang ditemukan ini kemudian akan dianalisa, oleh karena itu data serta fakta yang ada tidak hanya dijelaskan secara deskriptif namun data serta fakta ini dapat dianalisa guna menemukan pengertian dari data tersebut.

1.12. Metode Analisis

⁴⁰ Irawan, P. (2006). *Penelitian Kualitatif&Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: DIA FISIP UI, p. 60

Metode Analisis yang digunakan dalam adalah metode komparasi atau perbandingan serta bersifat kualitatif. Penulis melakukan perbandingan antara implikasi krisis Finansial 1998 dan Krisis Global 2008 terhadap Indonesia.

1.13. Sistematika penulisan

Tesis ini akan ditulis dalam lima pembabakan yaitu:

1. Bab I berisi pendahuluan yang menerangkan mengenai latar belakang, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, hubungan antar variabel, model analisis, asumsi, hipotesa, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II berisi proses awal terjadinya krisis finansial Asia 1997-1998 beserta proses masuknya krisis ini ke Indonesia.
3. Bab III berisi proses awal terjadinya krisis global 2008 beserta kondisi umum Indonesia sebelum terjadinya krisis.
4. Bab IV berisi implikasi krisis finansial Asia 1997-1998 dan krisis global 2008 beserta analisa perbedaan dampak krisis Finansial Asia 1997-1998 dan krisis Global 2008 terhadap Indonesia. Analisa ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya krisis dimana pada analisa ini akan menitikberatkan pada faktor-faktor non-ekonomi yang dalam hal ini adalah faktor politik.
5. Bab V merupakan penutup dan saran.